

PERBAIKI KONDISI KELAS MENENGAH INDONESIA

31 Okt 2025-Oleh: Gianie/Tim Suar

Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Survei Semesta Dunia Usaha: Perbaiki Kondisi Kelas Menengah Indonesia	3
Menahan Kelas Menengah Indonesia Tidak Turun Kelas	6
Kelas Menengah Indonesia juga Butuh Perlindungan Sosial	16

Survei Semesta Dunia Usaha: Perbaiki Kondisi Kelas Menengah Indonesia



Sejumlah pencari kerja antre saat Bursa Kerja 2025 di Plaza Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025). Lembaga keuangan global Morgan Stanley mencatat tingkat pengangguran usia 15-24 tahun di Indonesia mencapai 17,3 persen dan angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa.

Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia yang menurun dan sulit sejahtera menjadi sinyal “alert” bagi pemerintah. Perlu instrumen perlindungan sosial yang tepat agar peran kelompok ini bisa lebih optimal secara ekonomi, sosial, dan politik.

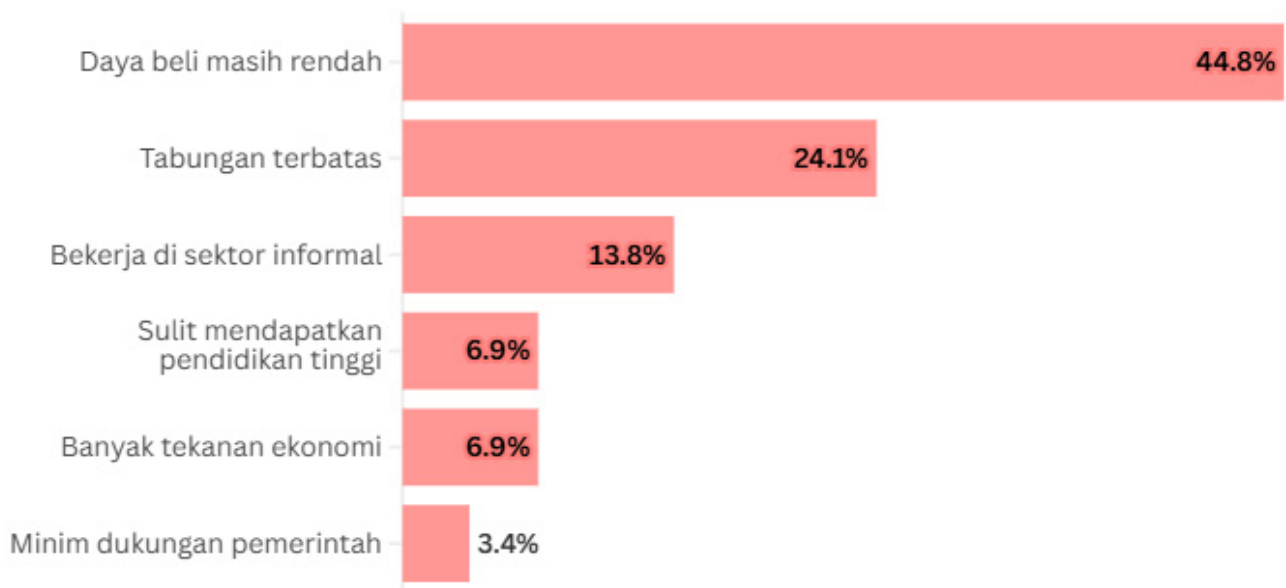
Penulis: Gianie

Kelas menengah di Indonesia ibarat lahan tidur yang butuh perhatian. Jika kebijakan untuk mengolah lahan itu tepat, ia akan menjadi lahan subur dan produktif. Sayangnya, lahan itu masih kurang perhatian. Kelas menengah bak hidup merana, tak sejahtera.

Kondisi kelas menengah Indonesia yang kurang sejahtera ini terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR. Beberapa temuannya:

- Narasumber yang terdiri atas para pengambil keputusan di perusahaan dan pengamat ekonomi mayoritas (76,3%) berpendapat bahwa kelas menengah di Indonesia belum sejahtera.
- Alasan kuat yang mengemuka adalah karena daya beli yang masih rendah dan kondisi tabungan yang terbatas.
- Mayoritas narasumber juga mengatakan kelompok kelas menengah ini belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah (76,3%).
- Kebijakan yang dianggap dapat membantu kelas menengah menjadi lebih sejahtera antara lain menyediakan lapangan kerja formal dan memberi insentif atau kemudahan pajak.
- Pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan sosial agar tidak hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga kelas menengah.

Alasan Kelas Menengah Belum Sejahtera



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
BY EXECUTIVES

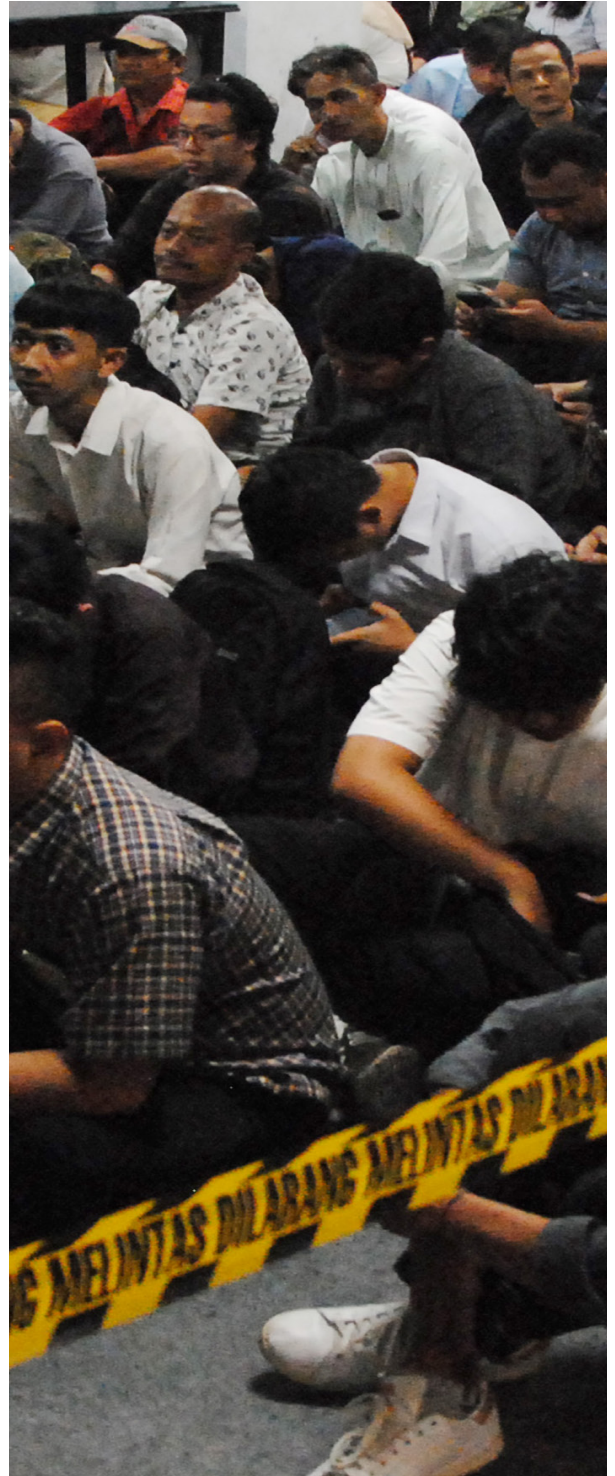
Definsi kelas menengah menurut Bank Dunia adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran yang berada dalam kisaran 3,5-17 kali di atas garis kemiskinan. Dengan perhitungan garis kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar Rp 595.242, maka pengeluaran kelas menengah berkisar Rp 2 juta-Rp 10 juta per bulan.

Bukan tanpa alasan kelas menengah menuntut perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Secara kuantitas, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia trennya menurun. Sementara dari segi kualitas, mereka mudah tergelincir jatuh menjadi miskin jika terjadi guncangan ekonomi.

Secara ekonomi, kelas menengah sesungguhnya merupakan motor penggerak roda pertumbuhan melalui konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara dari segi sosial-politik, kelompok yang umumnya memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi ini merupakan kelompok yang kritis dan berani menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Jika kelas menengah terabaikan, secara ekonomi mereka berpotensi jatuh ke garis kemiskinan dan akan menjadi beban pemerintah sehingga anggaran yang lebih besar harus dialokasikan untuk masyarakat miskin. Jika aspirasi kelas menengah tidak didengar, potensi terjadinya ketidakstabilan sosial-politik akan membesar.

Perlu dirumuskan instrumen perlindungan sosial yang tepat untuk penduduk kelas menengah agar kelompok ini berperan optimal secara ekonomi, sosial, dan politik. Jika hal ini dapat dilakukan, jalan bagi Indonesia bergerak menuju negara berpendapatan tinggi akan lebih mudah.



Menahan Kelas Menengah Indonesia Tidak Turun Kelas



Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan di salah satu stan pada pameran bursa kerja di Gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/10/2025). Foto: Antara/Raisan Al Farisi/bar.

Guncangan ekonomi akibat kombinasi dari pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi telah membuat kurva kelas menengah Indonesia menurun. Kelompok kelas menengah rentan tergelincir ke jurang kemiskinan. Indonesia menghadapi jalan terjal menuju negara berpendapatan tinggi.

Penulis: Gianie

Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan, pemimpin perusahaan, serta pengamat ekonomi terkait kondisi penduduk kelas menengah Indonesia yang semakin sulit sejahtera melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

Highlight:

- Penduduk yang masuk kelompok kelas menengah di Indonesia belum mencapai status sejahtera (76,3%). Alasannya, daya beli masih rendah (44,8%) dan kondisi tabungan yang terbatas (24,1%).
- Kelompok kelas menengah ini juga masih sulit mendapatkan pekerjaan formal dan penghasilan yang layak (89,5%).
- Kelompok kelas menengah ini belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah (76,3%).
- Kebijakan yang dianggap dapat membantu kelas menengah menjadi lebih sejahtera antara lain menyediakan lapangan kerja formal (31,6%) dan memberi insentif atau kemudahan pajak (26,3%).
- Pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan sosial agar tidak hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga kelas menengah.
- Sebelum pandemi Covid-19 menyerang di tahun 2020, Indonesia tumbuh sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang menjanjikan. Selama lebih dari 50 tahun, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,6% per tahun. Tahun 2019, pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 4.106 dollar Amerika Serikat (AS). Tingkat kemiskinan pun berhasil ditekan ke angka 9,2%.

Sejalan dengan itu, kelompok kelas menengah Indonesia pun berkembang. Di tahun 2019, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan satu dari lima orang Indonesia termasuk dalam kelompok kelas menengah. Jumlahnya sebanyak 57,33 juta jiwa atau 21,45%.

Penduduk miskin (poor) dan rentan miskin (vulnerable) yang berhasil keluar dari jurang kemiskinan ada yang tidak langsung naik kelas masuk ke kelompok kelas menengah, tetapi masuk ke dalam kelompok menuju atau calon kelas menengah yang disebut juga sebagai kelompok aspiring middle class. Jumlahnya saat itu sekitar 115 juta jiwa. Jika perekonomian terus membaik, mereka akan naik kelas.

Kelompok kelas menengah ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari segi konsumsi. Konsumsi pada kelompok ini tumbuh 12% per tahun sejak 2002 dan mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia.

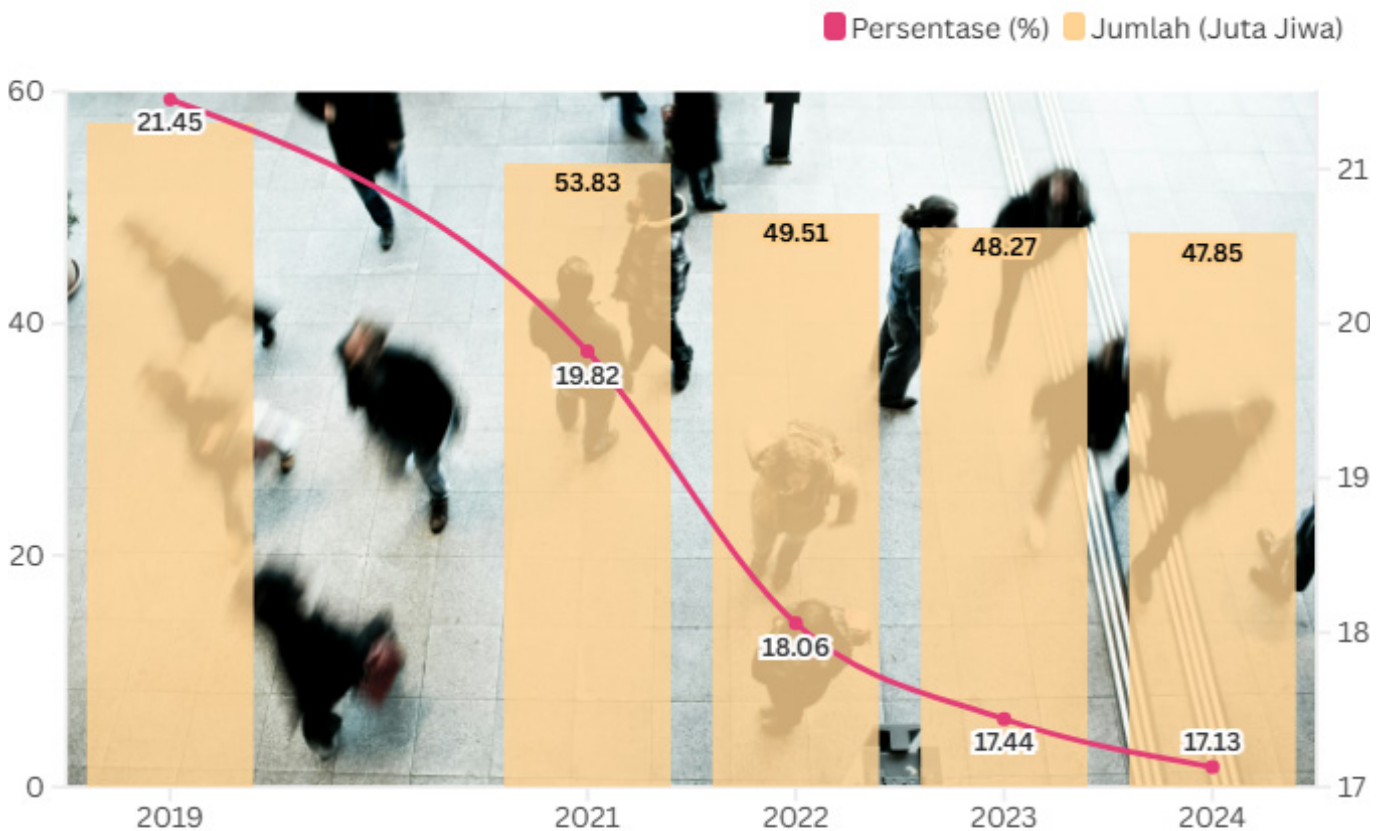
Kelas menengah dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi juga mampu menciptakan lapangan kerja.

Kelompok kelas menengah umumnya adalah penduduk dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Mereka biasanya bekerja sebagai pekerja kerah putih di sektor formal dan kebanyakan tinggal di daerah perkotaan. Dengan pendidikan dan tingkat keterampilan yang tinggi, tak sedikit yang kemudian menjalankan bisnis sendiri atau menjadi wirausaha. Sehingga, mereka juga menciptakan

lapangan kerja bagi orang lain.

Dengan potensi besar kelas menengah seperti itu, harapan Indonesia menjadi maju terbuka lebar. Sayangnya, pandemi Covid-19 membuyarkan harapan tersebut. Tahun 2020, jumlah kelas menengah menurun seiring penurunan pendapatan per kapita. Angka kemiskinan juga meningkat kembali.

Perkembangan Penduduk Kelas Menengah Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah Tim SUAR/Gianie.
Tahun 2020 tidak ada data. Photo by Timon Studler on Unsplash

SUAR SOLUTION JOURNALISM
for EXECUTIVES

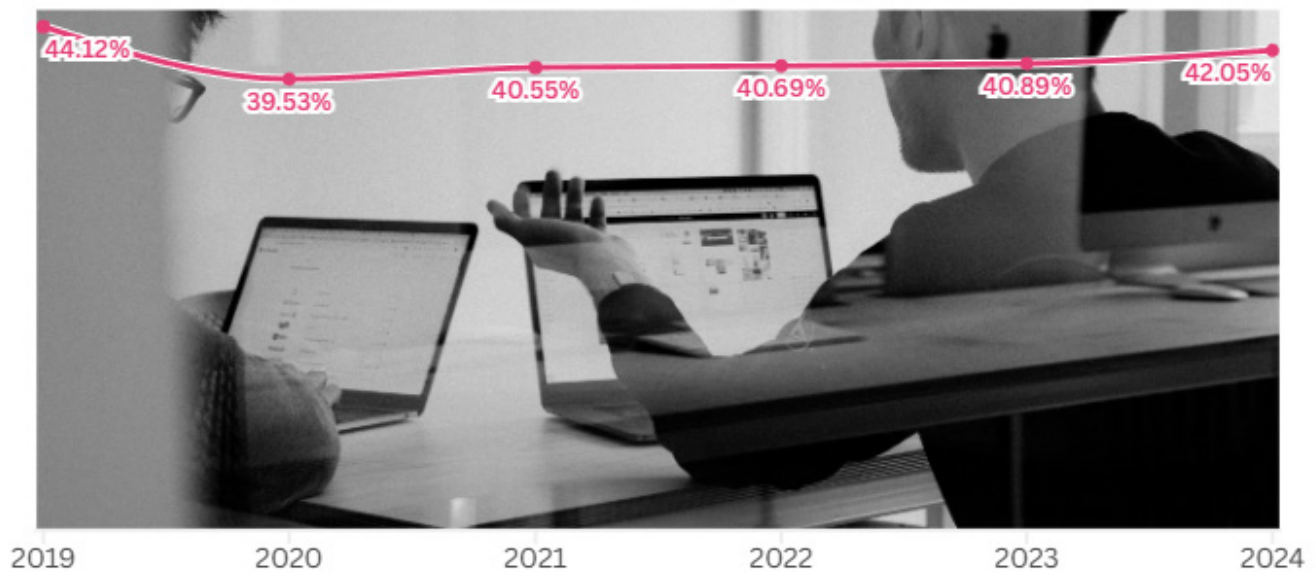
Sejak saat itu jumlah kelas menengah turun secara gradual. Di tahun 2021 jumlahnya menjadi 53,83 juta jiwa (19,82%). Tahun-tahun berikutnya jumlahnya terus menyusut hingga

tahun 2024 menjadi 47,85 juta jiwa (17,13%). Penurunan ini diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal.

Sebelum pandemi, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal berdasarkan data BPS adalah sebanyak 44,12% dari total penduduk yang bekerja. Akibat pandemi, di tahun 2020 jumlah pekerja di sektor formal turun menjadi 39,53%. Setelah perekonomian mulai pulih dari pandemi, jumlah

yang bekerja di sektor formal pun bertambah. Sayangnya, pertumbuhannya sangat lambat, sehingga kondisinya belum kembali seperti saat sebelum pandemi. Tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 42,05%.

Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal (2019-2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah Tim SUAR/Gianie.
Photo by charlesdeluvio on Unsplash

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Kelas menengah masih sulit **sejahtera**

BPS menggunakan acuan Bank Dunia dalam mengelompokkan penduduk berdasarkan pengeluaran. Kelompok kelas menengah adalah rumah tangga yang pengeluarannya dalam sebulan berkisar 3,5–17 kali angka garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 595.242 (September), maka pengeluaran kelompok kelas menengah Indonesia adalah berkisar Rp 2 juta–Rp 10 juta per kapita per bulan.

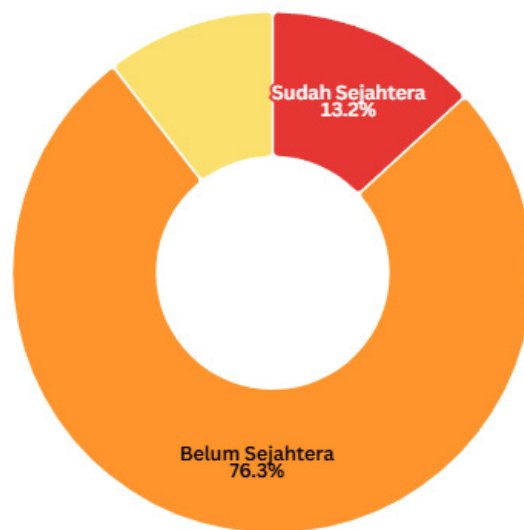
Sementara, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) adalah kelompok dengan pengeluaran 1,5–3,5 kali garis kemiskinan atau berkisar Rp 900.000–Rp 2 juta per kapita per bulan.

Dengan besaran pengeluaran tersebut kelompok kelas menengah Indonesia, menurut pendapat banyak ahli ekonomi, adalah kelompok yang masih jauh dari sejahtera. Pasalnya, jumlah penghasilan rumah tangga yang berstatus kelas menengah biasanya relatif sama dengan pengeluaran. Sehingga, mereka kesulitan untuk

menabung. Pengeluaran terbesar kelompok ini biasanya adalah untuk konsumsi pangan, membayar pajak, biaya pendidikan anak, dan cicilan perumahan.

Potret kelas menengah yang sulit sejahtera ini juga diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Tim SUAR.

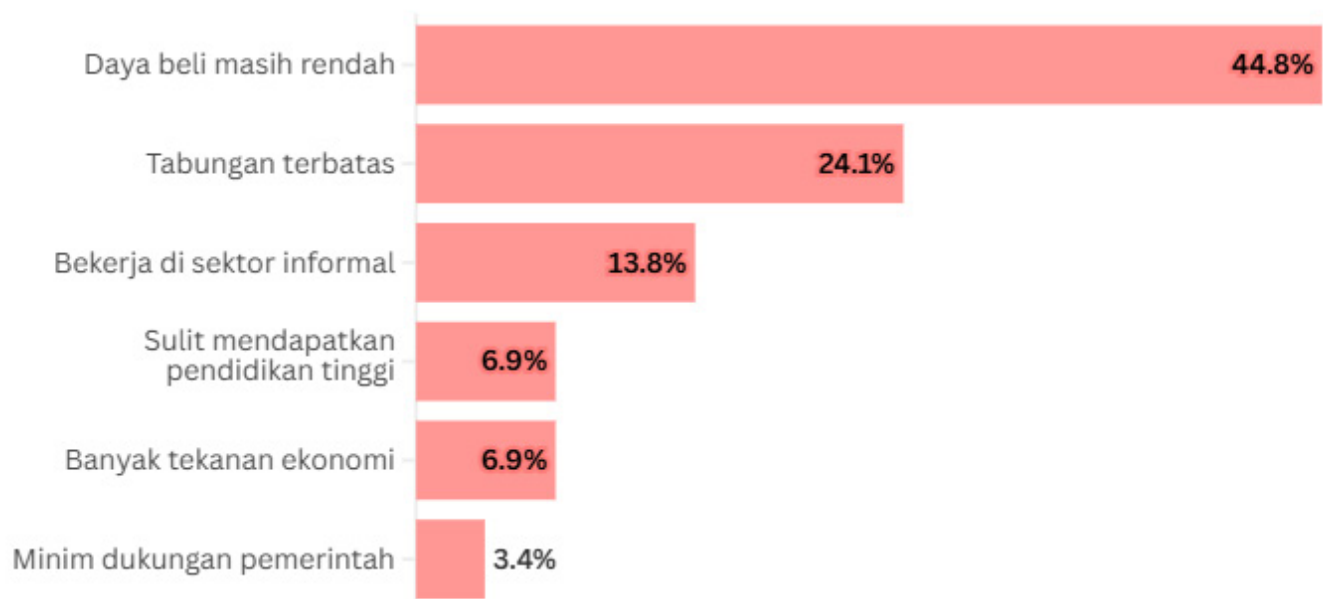
Pendapat tentang Penduduk Kelas Menengah Indonesia



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
for EXECUTIVES

Alasan Kelas Menengah Belum Sejahtera



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
for EXECUTIVES

Menurut mayoritas responden survei, penduduk kelas menengah Indonesia belum sejahtera (76,3%). Alasannya, daya beli yang masih rendah (44,8%) dan kondisi tabungan yang terbatas (24,1%). Alih-alih menjadi sejahtera dan bergerak menuju status berpendapatan tinggi, kelas menengah Indonesia terpaksa hidup dalam fenomena “mantab” alias makan tabungan.

Sejumlah alasan lain juga mengemuka, seperti masih banyak yang bekerja di sektor informal, kondisi sebagian masyarakat yang sulit mendapatkan pendidikan tinggi, banyaknya tekanan ekonomi, dan perhatian yang minim dari pemerintah.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap penduduk kelas menengah bisa dilihat dari kelompok ini yang tidak dilindungi oleh jaminan sosial dan tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak memenuhi kriteria. Selain itu, mereka juga menghadapi beban ekonomi karena kenaikan pajak.

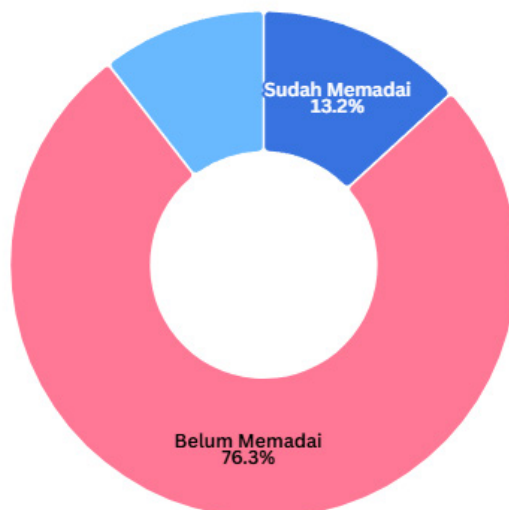
Sejak 1 April 2022, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah secara bertahap berencana menaikkan tarif PPN. Semula direncanakan per 1 Januari 2025 akan ada kenaikan PPN menjadi 12%, meski kemudian dibatalkan atas perintah presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat mengubah tarif PPN hingga maksimal 15%.

Langkah pemerintah menaikkan PPN itu dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 7 ayat (3) bahkan menjelaskan

bahwa pemerintah pusat dapat mengubah tarif PPN hingga batas maksimal 15% dan minimal 5%. Pelaksanaannya akan diturunkan melalui Peraturan Pemerintah.

Pendapat mengenai perhatian pemerintah terhadap kelas menengah



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
OF INDONESIANS

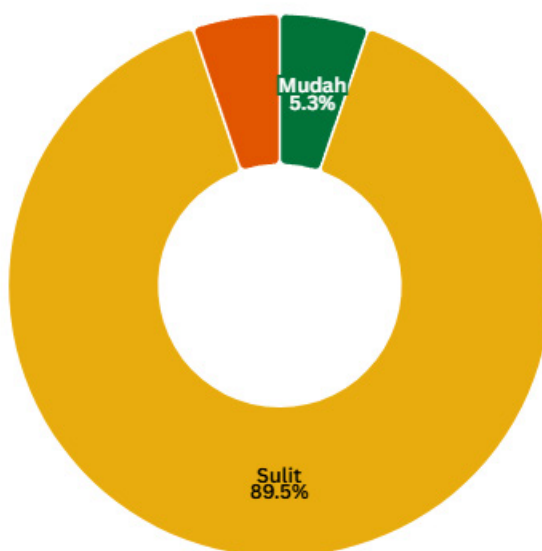
Tekanan ekonomi yang dialami kelompok kelas menengah karena minimnya perhatian pemerintah juga terlihat dari kerentanan kelompok ini terhadap kenaikan harga-harga, terutama harga pangan. Porsi terbesar dari konsumsi kelas menengah bawah dan orang miskin adalah pangan, khususnya beras. Kenaikan harga beras yang biasanya juga diikuti oleh harga-harga kebutuhan lain akan semakin menekan kehidupan kelompok menengah.

Inflasi yang tinggi semakin menggerus daya beli kelas menengah yang

penghasilannya terbatas. Kecilnya penghasilan kelas menengah disebabkan oleh keterbatasan akses mereka ke pekerjaan di sektor formal.

Hal ini pun diakui oleh narasumber survei. Mayoritas narasumber sepakat menyatakan bahwa penduduk kelas menengah sulit mendapatkan pekerjaan formal dan penghasilan yang layak (89,5%). Kondisi ini tidak lepas dari banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam setahun terakhir.

Akses Kelas Menengah ke Pekerjaan Formal dan Penghasilan Layak



n = 38

SUAR SOLUTIONS JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Menurunnya jumlah kelas menengah Indonesia sejak masa pandemi hingga saat ini sesungguhnya memberi sinyal bahwa kerja pemerintah belum fokus pada kelompok yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Padahal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

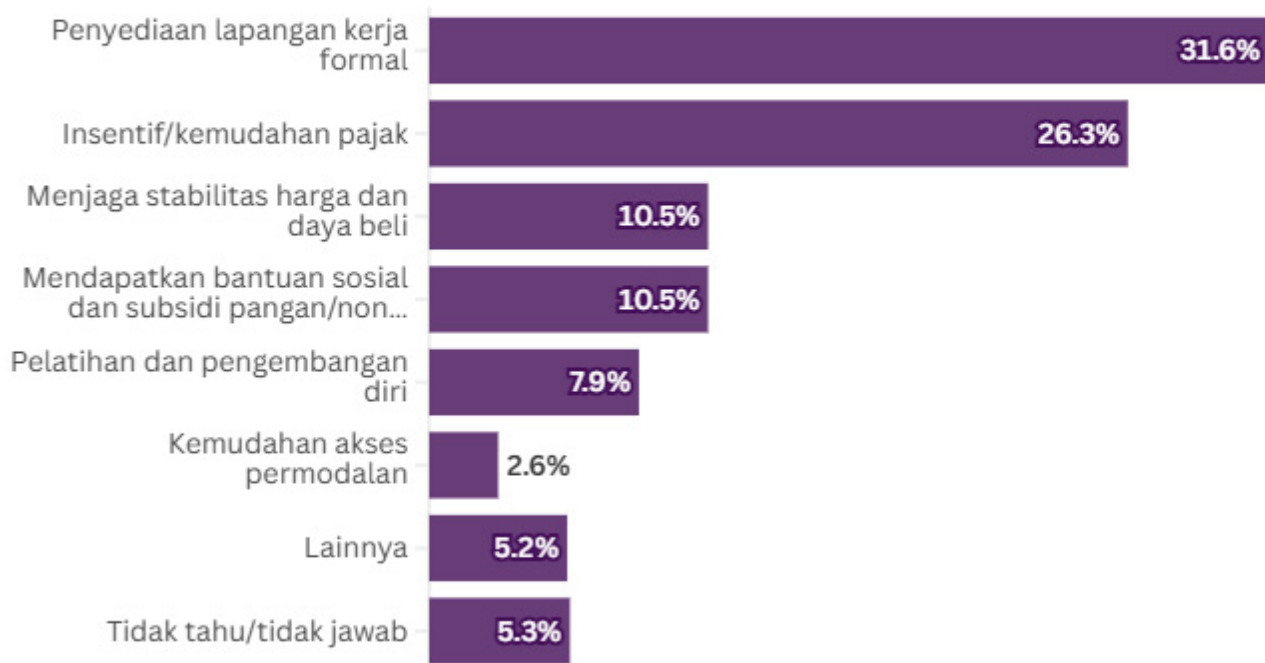
Jika kebijakan pemerintah tidak diarahkan untuk memperbaiki kondisi kelas menengah, maka roda yang akan memutar perekonomian akan bekerja lebih berat. Oleh sebab itu, perlu strategi khusus untuk menahan kelompok kelas menengah tidak turun kelas.

Membantu kelas menengah

Menurut narasumber responden, kebijakan yang dianggap dapat membantu kelas menengah menjadi lebih sejahtera antara lain adalah

menyediakan lapangan kerja formal (31,6%) dan memberi insentif atau kemudahan pajak (26,3%).

Kebijakan yang Dapat Membantu Kelas Menengah



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Penciptaan lapangan kerja di sektor formal akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberikan penghasilan yang lebih baik. Hal itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Stabilitas harga pangan juga perlu dijaga dengan menjamin kelancaran ketersediaan pasokan, sehingga konsumsi bisa bervariasi tidak semata untuk kebutuhan pangan.

Meningkatnya konsumsi masyarakat tentunya akan menggerakkan perekonomian sehingga pertumbuhan bisa tinggi. Namun, kondisi yang baru membaik tidak harus dibebani dengan kenaikan pajak. Perlu ada ruang bagi kelas menengah untuk menabung sehingga terjadi akumulasi aset. Dengan demikian, perlahan kondisi kelas menengah akan membaik dan menjadi sejahtera.

Sebanyak 10,5% narasumber berpendapat kelas menengah juga perlu mendapatkan bantuan sosial serta subsidi pangan/non-pangan seperti halnya yang diterima oleh penduduk miskin. Kebijakan ini tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah karena akan terkait dengan alokasi anggaran belanja.

Selain itu, penduduk kelas menengah juga perlu mendapatkan program pelatihan dan pengembangan diri (7,9%). Hal ini tak lain agar mereka memiliki posisi tawar yang tinggi dan dapat memperluas akses mendapatkan pekerjaan di sektor formal.



Pengunjung mencari informasi tentang lowongan kerja pada Jakarta Utara Job Festival 2025 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Foto: Antara/Ika Maryani/hma/hym.

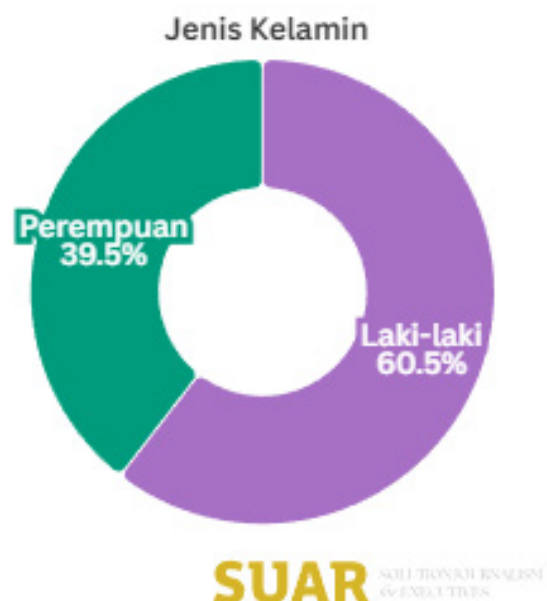
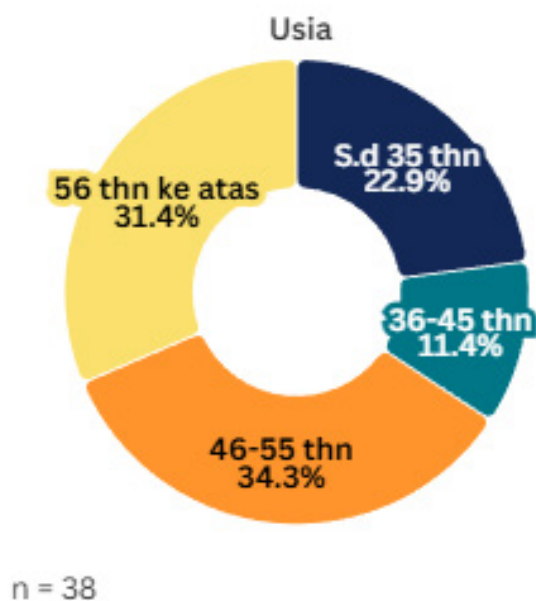
Metodologi dan profil responden

Survei Semesta Dunia Usaha dilakukan pada 9 September–25 September 2025. Sebanyak 38 narasumber (responden) dipilih secara purposive sampling dari kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi. Dari kalangan dunia usaha,

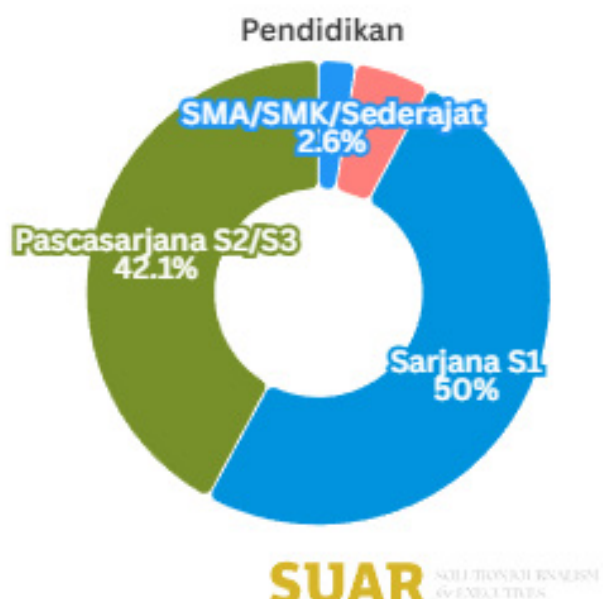
posisi narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga owner.

Dari segi pendidikan, sebagian besar responden adalah berpendidikan S1 (50%) dan pascasarjana S2/S3 (42,1%).

Profil Responden



Profil Responden



Kelas Menengah Indonesia juga Butuh Perlindungan Sosial



Warga penerima manfaat menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera antrre saat mencairkan Bantuan sosial (Bansos) di Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025). Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya/foc.

Kondisi kelas menengah Indonesia yang belum sejahtera terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR. Pemerintah juga perlu merumuskan instrumen perlindungan sosial yang tepat untuk kelas menengah.

Penulis: Gianie

Penduduk Indonesia yang masuk dalam kelompok kelas menengah selama beberapa dekade telah terbukti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia menyusut. Perlu kebijakan akselerasi, bahkan perlindungan sosial, agar jumlah kelas menengah tidak terus merosot.

Berbagai laporan Bank Dunia mengatakan bahwa kelas menengah yang besar menyebabkan konsumsi domestik yang lebih tinggi,

karena kelas menengah memiliki kecenderungan konsumsi (marginal propensity to consume) yang lebih tinggi daripada orang kaya dan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada orang miskin.

“Memperluas jumlah penduduk kelas menengah sangat penting bagi Indonesia untuk membuka potensi pembangunan dan mendorong negara ini menuju status negara berpendapatan tinggi.” (Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class. World Bank, 2020)

Investasi pada sumber daya manusia merupakan kunci untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan serta untuk meningkatkan produktivitas.

Agar jumlah kelas menengah Indonesia bisa semakin membesar, menurut Bank Dunia, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah.

Pertama, meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Investasi pada sumber daya manusia merupakan kunci untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan sehingga mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta untuk meningkatkan produktivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kedua, memperbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga pemerintah akan bisa mengumpulkan dana dari kelas menengah yang berkembang untuk membangun infrastruktur. Keberadaan infrastruktur penting untuk peningkatan produktivitas.

Definsi kelas menengah, menurut Bank Dunia, adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) yang berada dalam kisaran 3,5–17 kali di atas garis kemiskinan.

Pengelompokan Rumah Tangga Berdasarkan Pengeluaran versi Bank Dunia

Status	Ukuran Pengeluaran	Pengeluaran 2024 (Rp)
Miskin (Poor/P)	Garis Kemiskinan (GK)	595.242
Rentan (Vulnerable/V)	1 – 1,5 kali GK	595.242 – 892.863
Calon/Menuju Kelas Menengah (Aspiring Middle Class/AMC)	1,5 – 3,5 kali GK	892.863 – 2.083.347
Kelas Menengah (Middle Class/MC)	3,5 – 17 kali GK	2.083.347 – 10.119.114
Kelas Atas (Upper Class/UP)	Di atas 17 kali GK	Di atas 10.119.114

Sumber: World Bank. Diolah Tim SUAR/Gianie.

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Akan tetapi, guncangan ekonomi akibat pandemi telah menurunkan jumlah kelas menengah Indonesia. Jika sebelum pandemi jumlah kelas menengah Indonesia adalah sebanyak 57,33 juta jiwa (2019) atau 21,45%, tahun 2024 lalu jumlahnya turun menjadi 47,85 juta jiwa atau 17,13%.

Penduduk kelas menengah dengan tingkat pengeluaran yang besar akibat inflasi yang merangkak naik hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Dengan lapangan kerja yang berkurang karena banyak pemutusan hubungan kerja, penghasilan jadi pas-pasan karena mereka kemudian hanya mampu bekerja di sektor informal.

Karena penghasilan pas-pasan, solusi yang dilakuka adalah mengerem

pengeluaran atau mengurangi kebutuhan yang tidak terlalu perlu. Selain itu, kemampuan untuk menabung pun jadi terbatas. Bahkan, muncul fenomena “mantab” alias makan tabungan.

Kondisi kelas menengah Indonesia yang kurang sejahtera ini terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR belum lama ini. Menurut para narasumber yang mayoritas berasal dari dunia usaha ini, kelas menengah Indonesia belum sejahtera karena daya beli yang masih rendah (44,8%) dan kondisi tabungan yang terbatas (24,1%). Kelompok ini juga masih sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan penghasilan yang layak (89,5%).

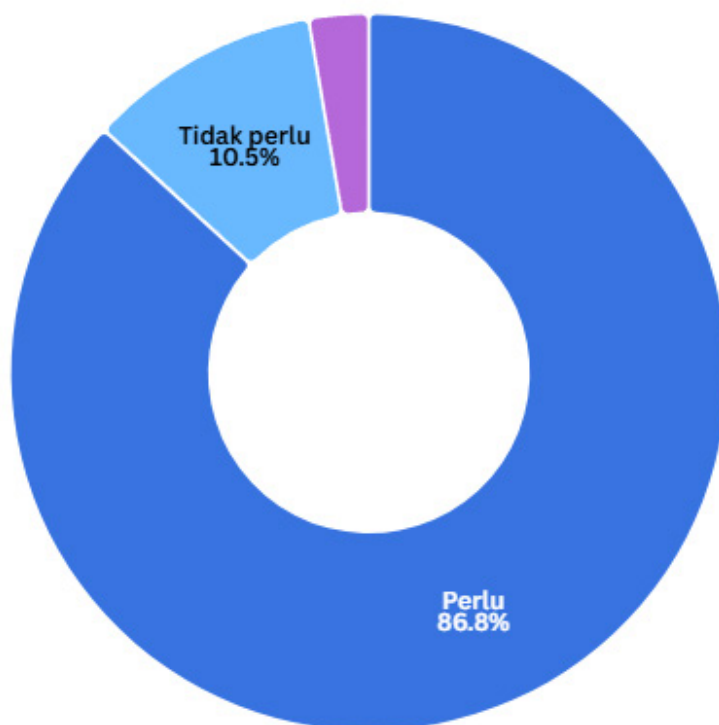
Kelas menengah tidak tergolong miskin. Tetapi, bila terjadi guncangan ekonomi akan membuat mereka jatuh miskin.

Sebagai warga kelas menengah, mereka tidak mendapat perlindungan sosial yang memadai. Mereka tidak mendapat bantuan sosial karena tidak miskin. Namun, sejumlah ahli ekonomi menyarankan kelompok menengah, terutama kelas menengah bawah atau yang termasuk dalam aspiring middle class, juga memperoleh perlindungan sosial. Mereka memang tidak tergolong miskin. Tetapi, bila terjadi guncangan ekonomi akan membuat mereka jatuh ke dalam

jurang kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan instrumen perlindungan sosial yang cocok untuk kelas menengah.

Narasumber survei sepakat menyatakan bahwa pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan sosial agar tidak hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga kelas menengah. Hal ini disampaikan oleh mayoritas (86,8%) responden.

Pendapat Mengenai Perluasan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah



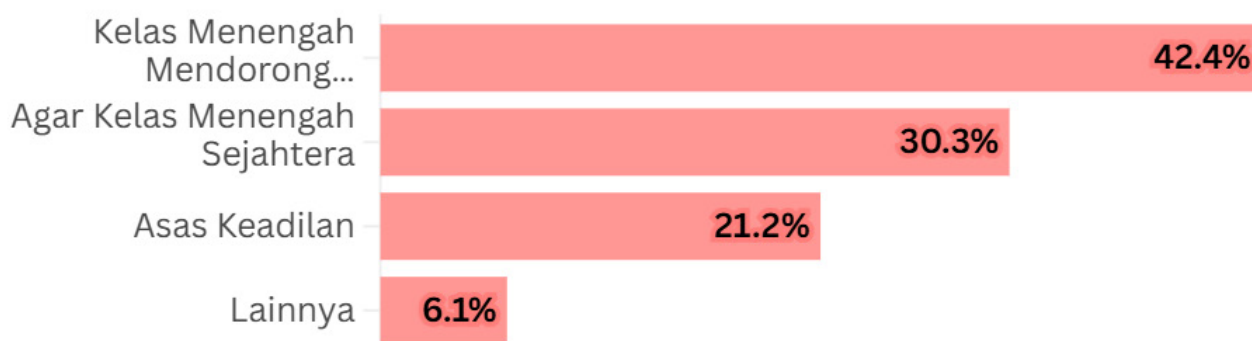
n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
for EXECUTIVES

Hal itu antara lain didasarkan pertimbangan agar kelas menengah bisa sejahtera, minimal tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan (30,3%). Alasan utamanya adalah karena keberadaan kelas menengah akan mendorong pertumbuhan ekonomi (42,2%) – khususnya lewat konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ada pula alasan karena asas keadilan.

Sebagian kecil narasumber memang menyatakan kelas menengah tidak perlu mendapat perlindungan sosial, karena berpandangan bahwa kelas menengah adalah kelompok yang mandiri. Program perlindungan sosial yang ada pun sudah cukup untuk kelompok yang ditargetkan, yaitu kelompok miskin.

Alasan Perlindungan Sosial Perlu Diperluas untuk Kelas Menengah



n = 38

SUAR SOLUTION JOURNALISM
for EXECUTIVES

Rumusan mengenai instrumen yang tepat untuk kelas menengah memang perlu dipikirkan. Hal itu karena keberadaan kelas menengah tidak hanya memiliki implikasi secara

ekonomi, tetapi juga sosial-politik. Jika kondisi kelompok kelas menengah ini terabaikan, ia akan memiliki implikasi sosial-politik ke depannya.

Kelas menengah dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup tinggi lebih kritis dan berani menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.

Pasalnya, sebagai kelas menengah yang berkembang – umumnya merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan dan pendapatan cukup tinggi – mereka lebih kritis dan berani menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Sebagai kelompok yang kritis mereka akan menuntut kualitas pelayanan publik, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Aspirasi kelas menengah akan terus meningkat. Mereka tidak hanya akan bicara mengenai “kebutuhan”, tetapi juga soal “keinginan” dan cita-cita untuk hidup yang lebih baik. Itu sebabnya, pemerintah tidak bisa hanya fokus kepada kelompok miskin, tetapi juga kelompok kelas menengah. Termasuk soal perlindungan sosial.



Kontak : Marketing

 **087784960904**

 **@suarinspirasi**

 **office@suar.id**

 **Suar Inspirasi Produktif**

 **Suar Inspirasi Produktif**

 **www.suar.id**